

Lindungi Pekerja dari Dampak Pandemi

JAKARTA (KR) - Pandemi Covid-19 telah menyebabkan dampak di sektor kesehatan, ekonomi, hingga ketenagakerjaan. Karena itu perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi sangat penting dalam meningkatkan rasa aman saat bekerja serta memberikan kepastian keberlangsungan ekonomi keluarga para pekerja jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

"Diharapkan, perlindungan dari negara melalui BPJS Ketenagakerjaan semakin lengkap dan dapat melindungi seluruh pekerja di Indonesia dengan baik," kata Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin pada Penganugerahan Penghargaan Paritran (Paritran Award) secara daring di Jakarta, Kamis (9/9).

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan) Anggoro Eko Cahyo mengatakan, partisipan Paritran Award 2020 ini dirai-

maikan kandidat dari 34 provinsi, 514 kabupaten/kota serta 660.000 perusahaan peserta BP Jamsostek.

"Seluruh kandidat diseleksi secara berlipis mulai tingkat provinsi, hingga mengerucut pada panitia seleksi pusat dan berlanjut pada sesi wawancara sampai akhirnya kami menemukan kandidat pemenang dari 7 provinsi, 8 kabupaten/kota, dan 18 badan usaha," ujar Anggoro.

Wapres menyatakan, Pemerintah terus melakukan langkah-langkah untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat pekerja dengan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp 500.000 selama dua bulan atau dengan total penerimaan Rp 1 juta perorang. BSU ini ditargetkan kepada 8,9 juta pekerja dari seluruh Indonesia.

"BSU diharapkan dapat meringankan beban para pekerja untuk menjalani ke-

hidupan yang penuh tantangan di era pandemi Covid-19 ini," tuturnya.

Terpisah, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 dr Reisa Broto Asmoro menyampaikan, ada tiga hal utama untuk mendalihkan Covid-19. Dalam siaran pers Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta Reisa mengatakan, tiga hal tersebut yakni pertama tetap menggalakkan disiplin protokol kesehatan. Jadikan masker sesuatu yang tren dan fashionable dengan memperhatikan tingkat filtrasi dan efektivitas masker.

Kedua, menggencarkan vaksinasi dan menyalurkan kelompok-kelompok yang kesulitan mengakses vaksinasi, seperti kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas. Dan ketiga, membatasi dan menyeleksi mobilitas dengan cara membiasakan menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk masuk ke fasilitas umum. (Sim/Ati)-f

Sambar

ungkap Kasat Lantas Polresta Semarang AKBP Sigit di lokasi kecelakaan.

Namun, untuk mengetahui kepastian penyebab kecelakaan, pihaknya masih mengusut dengan mengumpulkan ba-

rang bukti dan keterangan saksi, termasuk sopir truk tangki air penyebab kecelakaan. Sopir juga telah ditahan. (Cry)-f

DIY

jaminan bagi para pekerja supaya mereka bisa merasa tenang. "Pada dasarnya kami menyambut baik adanya Anugerah Paritran Award ini. Sebetulnya Pemda DIY hanya memberi ruang saja, di mana kita bekerja sama dengan pemberi polis ketenagakerjaan agar semua warga memiliki jaminan ketenagakerjaan. Tentunya kami juga ikut memberikan sosialisasi supaya mereka (para pekerja) bisa merasa tenang. Tidak hanya itu kami (Pemda DIY) juga memberikan jaminan ketenagakerjaan bagi non ASN sebagai salah satu bentuk fasilitas dan jaminan kepada mereka," kata Sultan di Gedhong Pracimasono Kompleks Kepatihan, Kamis (9/9).

Anugerah Paritran itu diberikan sebagai bentuk apresiasi tertinggi kepada pemerintah daerah, perusahaan besar, perusahaan menengah dan pelaku UKM, karena sudah menjalankan jaminan perlindungan sosial di wilayahnya masing-masing. Adapun untuk penilaian Anugerah Paritran sangat objektif, karena dilakukan secara selektif dengan melibatkan tim penilai independen dari para ahli, perwakilan serikat pekerja buruh, pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan.

Sekda DIY Kadamanta Baskara Aji menyampaikan inti dari penghargaan ini adalah sebagai apresiasi kepada pihak-pihak yang bisa memberikan perlindungan ketenagakerjaan bagi para pekerja baik sebagai pemberi kerja maupun Pemda. DIY sendiri persentase jumlah pekerja yang masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah cukup banyak, termasuk partisipasi dari pengusaha dan pemberi kerja semua baik yang formal

maupun non formal cukup bagus.

"Pemda DIY dianggap salah satu pelopor untuk bisa memberikan perlindungan kepada para pekerja yang non ASN baik yang formal maupun non formal. Disnakertrans DIY langsung turun di lapangan melakukan monitoring dan memberikan teguran jika ada pengusaha yang tidak mendaftarkan anak buahnya di BPJS Ketenagakerjaan," katanya.

Baskara Aji menilai keberhasilan tersebut didukung kinerja BPJS Ketenagakerjaan Cabang DIY yang cukup bagus. Pihaknya pun akan selalu melakukan sosialisasi dan memberikan dorongan kepada pemberi kerja dan pekerja non formal, informal supaya mengikuti jaminan ini karena contohnya banyak yang sudah mendapatkan santunan. BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya santunan kematian atau kecelakaan semata, tetapi santunan hari tua, pensiun dan sebagainya.

"Saya kira bisa diikuti karena iurannya tidak sebanding dengan yang didapat kalau terjadi sesuatu. Jadi akan memberikan manfaat yang lebih bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan," imbuhnya.

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan M Aditya Warman melihat Paritran Award 2020 ini memiliki semangat kolaborasi atas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka proteksi dan empowerment. Oleh karena itulah, BPJS Ketenagakerjaan berkolaborasi dengan semua mitranya untuk memproteksi dan empowerment.

"Selamat atas anugerah Paritran Award 2020 yang pertama kali diterima Pemda DIY pada gelaran keempat tahun

ini. Penganugerahan ini merupakan event tahunan yang memberikan apresiasi kepada pemkab/pemkot, pemprov, perusahaan menengah, kecil dan mikro yang memberikan dukungan luar biasa kepada BPJS Ketenagakerjaan di bidang masing-masing," tutur Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Tengah dan DIY Suwilwan Rachmat yang disapa Willy.

Setelah DIY meraih peringkat terbaik I, maka untuk peringkat Terbaik II diraih Papua Barat dan Terbaik III diperoleh Sulawesi Utara.

Willy menyatakan Pemda DIY berhasil meraih penghargaan ini karena telah membuat MoU atau nota kesepakatan guna mendukung program BPJS Ketenagakerjaan di DIY yang didukung Pemkab/Pemkot se-DIY bersinergi sampai ke bawah yang akan diperkuat dengan Pergub nantinya. Adapun kriteria penerima Paritran Award antara lain dukungan regulasi, coverage peserta yang luas, dukungan pemerintah dengan kegiatan OPD, perlindungan kepada pekerja rentan dan masyarakat menengah ke bawah.

"Kepedulian Pemda DIY sangat tinggi terhadap pekerja di DIY dan mempunyai program unggulan sehingga sangat layak mendapatkan penghargaan ini. Pemda DIY juga masih punya kesempatan menjadi juara di tahun depan, sebab memiliki potensi setidaknya 160 ribu tenaga RT/RW se-DIY yang belum terdaftar dalam proses akuisisi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," pungkas Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta Asri Basir.

(Ria/Ira/San)-f

Petaka

membuat amukan api tidak terkendali. Sebanyak 81 napi luka ringan, tetapi 41 napi tewas karena tidak sempat menyelamatkan diri.

Kebakaran Lapas Tangerang adalah kasus kebakaran kesekian kali yang terjadi di Indonesia. Menurut catatan, dalam tiga tahun terakhir telah terjadi 13 kasus kebakaran Lapas, dan 10 kejadian terjadi di Lapas dalam kondisi di ambang batas overcrowding. Di Lapas Tangerang, penghuni penjara dilaporkan sebanyak 2.072 napi, sementara kapasitas hanya 600 orang. Lapas yang kelebihan 245% penghuni ini, ketika di sana terjadi kebakaran maka dampaknya pun sangat mengerikan.

Soal kondisi lapas yang overload sebetulnya bukan isu baru. Sudah bertahun-tahun kondisi lapas yang tidak layak telah dikeluhkan berbagai kalangan. Saat ini total ada 249.918 napi dan tahanan di seluruh lapas dan rutan di Indonesia. Padahal kapasitas lapas dan rutan sebetulnya hanya 135.561 orang, sehingga wajar jika di berbagai lapas jumlah penghuni tampak berjajar riuh dari layak.

Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per 6 Mei 2021, Lapas di seluruh Indonesia diketahui mengalami kelebihan penghuni hingga 131,077%. Sejumlah risiko

yang mungkin terjadi dan perlu diantisipasi agar tidak terjadi persoalan yang sama di lingkungan lapas adalah:

Pertama, akibat yang *overload*, potensi terjadinya perkelahian terbuka di kalangan napi sangat mungkin pecah. Di lingkungan lapas sudah bukan rahasia lagi kalau kehormatan napi ditentukan oleh *space* yang tersedia bagi mereka. Napi yang senior yang disegani, mereka biasanya menempati ruang penjara dan lahan yang lebih nyaman daripada napi lain. Akan tetapi, ketika lingkungan lapas makin lama makin penuh, perebutan *space* yang terbuka pun tidak terelakkan terjadi.

Kedua, akibat lapas *overload*, risiko dan ancaman bahaya juga akan menghantui petugas sipir penjara. Bukan tidak mungkin terjadi keselamatan sipir terancam karena keterbatasan jumlah personel dibandingkan jumlah napi. Ketiga, kondisi lapas yang dijaji penghuni yang kelewat batas tentu mempengaruhi upaya pembinaan yang dikembangkan. Alih-alih mampu menyiapkan proses adaptasi kembali masyarakat ke masyarakat selepas dibui, dalam kenyataan di lapas justru banyak napi seolah menemukan sekolah kriminal baru untuk meningkatkan kualitas tindak kejahatan yang bisa dilakukan.

Untuk mencegah agar tidak muncul kerusuhan sosial

Sambungan hal 1

dan petaka kebakaran di lapas, yang dibutuhkan selain perbaikan infrastruktur, sebetulnya adalah perubahan konsep rehabilitasi bagi para napi. Tidak mungkin dengan keterbatasan dana dan jumlah SDM proses penghukuman di lingkungan lapas dilakukan secara terbuka: siapa pun yang bersalah kemudian harus dihukum masuk penjara. Untuk napi-napi tertentu, tindakan penghukuman perlu dijajagi kemungkinannya dengan hukuman dalam bentuk kerja sosial atau bahkan rehabilitasi di luar lapas. Seperti selama ini telah diberlakukan, baGI napi narkoba pemerintah telah membuka opsi rehabilitasi di luar penjara.

Berkaca dari kasus kebakaran Lapas Tangerang, momen ini mungkin bisa menjadi acuan untuk menjajagi kemungkinan pilihan alternatif penghukuman bagi para terdakwa yang dinyatakan bersalah di pengadilan. Untuk napi yang melakukan tindak kejahatan yang tergolong ringan, ada baiknya jika mereka diberi kesempatan untuk menjalani bentuk lain penghukuman di luar lapas. Bagaimana pendapat anda?

(Penulis adalah Dosen Masalah Sosial dan Ilmu Kriminologi Prodi S2 Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Universitas Airtangga)-d

CEGAH PENYEBARAN VARIAN MU

Pengawasan Pintu Masuk Ditingkatkan

JAKARTA (KR) - Pemerintah bergerak cepat dalam mengantisipasi masuknya Covid-19 varian Mu ke Tanah Air dengan meningkatkan pengawasan di seluruh area pintu masuk wilayah Indonesia dari luar negeri.

"Pemerintah bergerak cepat dan tepat untuk mengantisipasi masuknya Covid-19 varian Mu atau B.1.621. Hal ini dilakukan agar Indonesia tidak mengalami gelombang ketiga Covid-19," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dalam keterangan persnya, Kamis (9/9).

Menkominfo Johnny memastikan pengawasan dilakukan di seluruh pintu masuk, seperti bandara dan pelabuhan. Pemeriksaan dilakukan secara whole genome sequencing kepada seluruh warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA) yang memiliki riwayat perjalanan ke negara dengan tingkat penyebaran varian Mu tinggi, seperti Kolombia, Jepang, India, Hongkong, Ekuador.

Whole genome sequencing merupakan upaya untuk mengetahui penyebaran mutasi virus SARS-Cov2 atau Covid-19. Sejauh ini, varian Mu telah ditemukan di 46 negara, namun

belum ditemukan di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Hingga kini, lanjut Menkominfo, WHO mengategorikan varian Mu sebagai Variant of Interest (VoI) atau varian yang perlu kajian lebih lanjut terkait dampak dalam penularan dan tingkat laju penularannya.

Epidemiologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Bayu Satria Wiratama di Yogyakarta menyatakan, meski tren penurunan kasus dan kematian sudah mulai terlihat di DIY, namun masyarakat tidak boleh lengah dan mengabaikan protokol kesehatan. Jadi perlu terus dijaga, jangan sampai menurunnya jumlah kasus berdampak pada berkurangnya level kewaspadaan sehingga mobilitas naik. Pasalnya jika hal itu sampai terjadi akan meningkatkan kembali risiko penularan kasus.

"Walaupun penularan kasus dan kematian terus menurun, masyarakat tidak boleh abai. Sebaliknya harus tetap menjaga kedisiplinan terutama di ruang publik dan tempat kerja, karena di sana kita berinteraksi dengan orang lain yang tidak serumah," kata Bayu.

(Ria/Ira/San)-f

Kemenkumham

Jumlah korban kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang bertambah tiga orang, sehingga total keseluruhan menjadi 44 orang. Ketiga korban tersebut adalah Hadyanto bin Ramli, warga Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Korban kedua atas nama Adam Maulana bin Yusuf Hendra, warga Kelurahan Cimerang Kecamatan Purabaya Sukabumi Jabar dan korban ketiga Timothy Jaya bin Siswanto, napi tindak pidana narkoba yang beralamat di Jalan Sabang Taman Imam Bonjol Tangerang.

Menkumham Yasonna Laoly menjangkakan uang santunan senilai Rp 30 juta kepada masing-masing keluarga napi yang menjadi korban kebakaran Lapas Kelas I Tangerang.

Sehubungan peristiwa kebakaran tersebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LP-SK) menyatakan, negara atau pemerintah harus bertanggung jawab penuh atas insiden tersebut. Tanggungjawab itu, menurut Wakil Ketua LPSK RI Maneger Nasution, dapat diwujudkan dengan memastikan semua hak korban maupun keluarga korban terpenuhi. "Termasuk juga bagi warga binaan yang saat ini sedang dalam perawatan di RSUD Tangerang," kata

Sambungan hal 1

Manager Nasution.

Pada bagian lain Kementerian Hukum dan HAM mengingatkan petugas di lapas untuk selalu berhati-hati, menjaga kontingensi hal-hal risiko yang akan terjadi demi keselamatan dan keamanan di satuan kerja masing-masing.

"Kita semua punya kewajiban untuk mereview, melihat dan mengamankan satuan kerjanya masing-masing," kata Staf Ahli Menkumham Bidang Ekonomi, Lucky Agung Binarto, usai penguatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Rutan Kelas IIB Temanggung, Kamis petang.

la mengatakan, kebakaran seperti di Lapas Kelas I Tangerang jangan sampai terjadi lagi, apalagi berentetan di lapas lain. Oleh karena itu, penting dilakukan pemeriksaan instalasi listrik seperti kabel-kabel dan sambungan listrik. Semua harus sesuai standar dan tidak membahayakan. Pada kesempatan itu, Lucky Agung memberikan tips untuk menuju zona integritas, yakni puasa dan membentuk tim pengawas internal. Puasa maksudnya menahani diri dan mawas diri, sedang tim pengawas internal dimaksudkan mengawasi gerak gerik pegawai. (Ful/Osy)-f

Atur

hanya menjadi pekerjaan besar Kemenpora, tetapi dengan kementerian/lembaga lain. Misalnya, pembangunan Cibubur Youth Sport Center yang mengerjakan Kementerian PUPR. Diharapkan tahun 2022 atau akhir 2021 akan terbangun Cibubur Youth Sport Center di Cibubur," ujar Amali.

Dalam pengerjaannya, Gedung POPKI Cibubur tetap akan dipertahankan, sebagian besar juga akan diganti. Gedung RSON akan ditingkatkan fungsinya menjadi Pusat Sport Science Nasional. "Asrama, sekolahnya, dan ini semua bukan kami yang mengerjakan. Talenta-talenta atlet yang ada tentu sesuai dengan kewenangan-kewenangannya. Kalau SMP itu di tingkat kabupaten/kota, SMA di

provinsi, nah itu akan dikerjak juga bersama-sama. Meski demikian, technical assistance tetap di Kemenpora," urainya.

Diharapkan lahirnya Perpres 86 ini akan mempercepat implementasi DBON. Dalam jangka pendek, Kemenpora akan mulai mensosialisasikan DBON dan Perpres 86 ke semua stakeholder olahraga, pemangku kepentingan yang tercantum dalam perpres.

Mempora juga berharap dukungan media untuk mensosialisasikan hal itu. "Kami mohon dukungan dari para jurnalis dan media untuk mensosialisasikan DBON dan juga Perpres 86 Tahun 2021 ini. Kami menyadari peran teman-teman jurnalis sangat besar dalam sosialisasi ini," katanya. (Sim)-d



Prakiraan Cuaca		Jumat, 10 September 2021				
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul	☀️	☁️	☁️	☁️	23-30	70-95
Sleman	☀️	☁️	☁️	☁️	21-30	70-95
Wates	☀️	☁️	☁️	☁️	23-30	70-95
Wonosari	☀️	☁️	☁️	☁️	23-30	70-95
Yogyakarta	☀️	☁️	☁️	☁️	23-30	70-95

Tata Kelola UMKM Saat Era Pandemi, Pentingkah ?



Reza Widhar Pahlevi S.E., M.M., CSA
Dosen Prodi S1 Kewirausahaan Universitas Amikom Yogyakarta

SISTEM Informasi saat ini menjadi "alat" yang sangat penting bagi sebuah organisasi dalam mendukung operasional organisasinya secara efektif. Di masa pandemi covid-19 saat ini organisasi memanfaatkan sistem informasi dengan semaksimal mungkin dalam mendukung operasional organisasinya. Saat ini organisasi memandang penerapan sistem informasi bukan hanya sebatas alat pendukung saja (support system) namun lebih dari itu bahwa sistem informasi beserta teknologi pendukungnya sudah menjadi bagian dari perencanaan strategis organisasi

dalam mencapai visi dan misi organisasi tersebut sehingga dapat dikatakan sebagai alat strategis (strategic system). Melihat peran sistem informasi yang sangat strategis bagi organisasi modern saat ini maka diperlukan strategi yang tepat untuk memastikan penerapan sistem informasi tersebut sudah bermutu dan sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam mendukung visi misi organisasi tersebut dalam rencana strategi jangka panjang organisasi. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan audit sistem informasi yang terintegrasi untuk memastikan mutu sistem informasi yang diterapkan oleh organisasi tersebut tetap terjaga. Selama ini pandangan orang terhadap kegiatan audit sistem informasi adalah sebatas upaya untuk mencari-cari kesalahan dalam sebuah sistem informasi. Tentunya pendapat ini tidak sepenuhnya benar. Saat ini banyak organisasi yang menerapkan sistem informasi justru berupaya memperkuat kegiatan audit sistem informasi dalam organisasinya dalam rangka untuk

memastikan mutu sistem informasi dan layanan sistem informasinya dapat terus terjaga dan mampu mendukung visi misi organisasi tersebut. Audit menurut para ahli adalah suatu proses dalam melakukan pelacakan kejadian-kejadian, kegagalan-kegagalan, percobaan olentikasi dan akses ke sebuah sistem. Audit dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi kelemahan-kelemahan sistem dalam sebuah organisasi dan dapat membantu organisasi dalam menentukan langkah berikutnya terkait kebijakan pengembangan sistem yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Menurut Ron Weber Audit Sistem Informasi adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer (sistem informasi) dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan menggunakan sumber daya secara efisien. Audit bukanlah asesmen/ penilaian melainkan pencocokan kesesuaian/



conformity antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu standar. Audit sendiri merupakan salah satu bagian dari siklus sistem manajemen sistem informasi yang biasa dikenal dengan siklus PDCA (Plan-Do-Check-Action). Audit ada pada tahap Check dari siklus PDCA. Dalam melakukan audit sistem informasi maka organisasi harus paham juga standar apa saja yang digunakan dan standar terkait lainnya. Standar yang digunakan untuk mengaudit sistem informasi yaitu standar yang diterbitkan ISACA yaitu ISACA IS Auditing Standard. ISACA (the Information Systems Audit and Control Association) adalah organisasi profesional internasional yang berfokus pada tata kelola IT (IT Governance). Selain menyetujui standar untuk audit sistem informasi, ISACA juga menerbitkan pedoman dan prosedur cara

melakukan audit sistem informasi yaitu IS Auditing Guidance dan IS Auditing Procedure. Bagaimana Audit Sistem Informasi dapat meningkatkan mutu penerapan sistem informasi dan layanan sistem informasi dalam sebuah organisasi? Berikut adalah beberapa alasannya: - Audit sistem informasi yang sukses tidak dilihat dari berapa banyak jumlah temuan ketidaksesuaian (nonconformity) yang ditemukan dalam satu sesi audit, melainkan berapa banyak poin-poin peluang perbaikan yang dapat ditemukan oleh auditor selama proses audit sistem informasi dilakukan dalam sebuah organisasi. Peluang-peluang perbaikan inilah yang menjadi dasar acuan organisasi dalam meningkatkan mutu sistem informasi dan layanan sistem informasi yang diterapkan di organisasinya yang di audit. - Auditor yang kompeten dan memiliki pengalaman kerja mengaudit sistem informasi di banyak organisasi biasanya tidak hanya mampu menemukan temuan

ketidaksesuaian (nonconformity) namun dapat juga memberikan rekomendasi perbaikan terkait temuan-temuan tersebut berdasarkan justifikasi kompetensinya dan pengalaman yang didapatkan dari praktik baik penerapan sistem informasi dari organisasi lain yang pernah di audit oleh auditor tersebut. - Auditor akan melihat penerapan sistem informasi di organisasi yang di audit secara "helicopter view" dan obyektif seperti efektifitas, efisiensi, availability system, reliability, confidentiality, dan integrity, aspek security, audit atas proses, modifikasi program, audit atas sumber data, dan data file. - Hasil audit sistem informasi ini akan dijadikan acuan oleh organisasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan sampai sesi audit berikutnya. Organisasi akan mengidentifikasi hasil temuan-temuan auditor berdasarkan skala prioritas yang diselarskan dengan ljuatan organisasi (*)